

PENGUATAN KAPASITAS ADMINISTRASI DESA UNTUK KEBIJAKAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN

Yahya Antu¹, Tety Thalib², Masran Biahimo³

Universitas Bina Taruna Gorontalo, Indonesia

yahyaantu03@gmail.com, tetythalib72@gmail.com, masranbiahimo123@gmail.com

ABSTRAK

Pemerintah desa memegang peran strategis dalam penerapan kebijakan lingkungan di tingkat lokal, tetapi keterbatasan kapasitas administrasi dapat menghambat respons terhadap risiko longsor, kelangkaan air bersih, dan pengelolaan lingkungan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan memperkuat pemahaman dan kemampuan aparatur serta masyarakat Desa Oluhuta dalam mengelola kebijakan lingkungan berkelanjutan. Pelaksanaan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* melalui sosialisasi, Focus Group Discussion, analisis kebutuhan, diskusi, dan pendampingan. Hasil kegiatan menunjukkan indikasi peningkatan pemahaman peserta mengenai regulasi lingkungan, mitigasi bencana, pengelolaan air, serta pentingnya partisipasi masyarakat. Kegiatan juga menghasilkan pemetaan masalah administrasi lingkungan, rancangan arah tindak lanjut berupa penyusunan peraturan desa dan prosedur pengelolaan lingkungan, serta penguatan kemitraan antara perguruan tinggi, pemerintah desa, dan masyarakat. Namun, karena belum menggunakan pengukuran pretes-pascates, perubahan kapasitas belum dapat dinyatakan secara kuantitatif. Pendampingan berkelanjutan dan monitoring berbasis indikator diperlukan agar hasil kegiatan berkembang menjadi kebijakan dan praktik desa yang konsisten.

Kata Kunci: *Administrasi Desa; Kebijakan Lingkungan; Kapasitas Aparatur; Partisipasi Masyarakat; Pembangunan Berkelanjutan*

ABSTRACT

Village governments play a strategic role in implementing environmental policies at the local level, yet limited administrative capacity may constrain responses to landslide risks, clean-water scarcity, and environmental management challenges. This community service program aimed to strengthen the knowledge and practical capacity of village officials and residents of Oluhuta Village in managing sustainable environmental policies. The program adopted a *Participatory Action Research* approach through socialization, focus group discussions, needs assessment, dialogue, and mentoring. The activities indicated improved participant understanding of environmental regulations, disaster mitigation, water management, and community participation. They also produced a mapping of administrative constraints, follow-up directions for drafting village regulations and environmental management procedures, and stronger collaboration among the university, village government, and community. Nevertheless, because no pre-test and post-test were conducted, capacity improvement cannot yet be claimed quantitatively. Continuous mentoring and indicator-based monitoring are required to translate the program outcomes into consistent village policies and practices.

Keywords: *Village Administration; Environmental Policy; Apparatus Capacity; Community Participation; Sustainable Development*

PENDAHULUAN

Pembangunan berkelanjutan menempatkan pemerintah desa sebagai aktor penting karena sebagian persoalan lingkungan muncul dan harus ditangani pada tingkat lokal.

Pemerintah desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mengatur sumber daya, memfasilitasi partisipasi warga, dan membangun ketahanan wilayah. Dalam perspektif environmental governance, pengelolaan lingkungan merupakan proses yang melibatkan negara, masyarakat, serta aktor nonnegara dalam pembentukan dan pelaksanaan keputusan lingkungan (Lemos & Agrawal, 2006). Karena itu, keberhasilan kebijakan lingkungan desa tidak cukup ditentukan oleh keberadaan regulasi, tetapi juga oleh kapasitas aparatur, kelembagaan, koordinasi, informasi, dan keterlibatan masyarakat.

Konsep capacity building menjelaskan bahwa peningkatan kinerja pemerintahan memerlukan penguatan pada tiga ranah yang saling berkaitan, yaitu pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan pembenahan kerangka kelembagaan (Grindle, 1997). Pada tingkat desa, kapasitas administrasi mencakup kemampuan memahami regulasi, menyusun dokumen kebijakan, mengelola data, membangun koordinasi, mengalokasikan sumber daya, serta melakukan pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian, pelatihan pengetahuan saja belum memadai apabila tidak dilanjutkan dengan pembentukan prosedur kerja, pembagian peran, dukungan anggaran, dan dokumen kebijakan yang dapat dioperasionalkan.

Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, memiliki karakter pesisir dan perbukitan dengan potensi sumber daya kelautan, perikanan, pertanian, dan pariwisata. Pada saat yang sama, wilayah ini menghadapi risiko longsor, gangguan kualitas dan ketersediaan air bersih, pengelolaan sampah, serta tekanan terhadap ekosistem. Kerangka Sendai menegaskan bahwa pengurangan risiko bencana perlu didasarkan pada pemahaman risiko, penguatan tata kelola risiko, investasi untuk ketangguhan, dan kesiapsiagaan yang melibatkan seluruh unsur masyarakat (UNDRR, 2015). Hal ini menuntut pemerintah desa memiliki administrasi berbasis data, dokumen mitigasi, mekanisme koordinasi, dan prosedur respons yang tidak hanya bersifat darurat.

Hasil identifikasi awal menunjukkan beberapa kesenjangan: pemahaman regulasi lingkungan belum merata, belum tersedia peraturan desa yang secara khusus mengatur pengelolaan lingkungan, koordinasi antarlembaga belum optimal, anggaran lingkungan terbatas, serta partisipasi masyarakat belum terlembaga. Dalam perspektif partisipasi Arnstein (1969), kehadiran masyarakat dalam forum belum otomatis menunjukkan partisipasi yang bermakna; kualitas partisipasi ditentukan oleh sejauh mana warga memiliki informasi, ruang menyampaikan pandangan, dan pengaruh terhadap keputusan. Kegiatan pengabdian sebelumnya sering menitikberatkan pada sosialisasi kebersihan atau tindakan fisik sesaat. Nilai kebaruan kegiatan ini terletak pada penggabungan penguatan administrasi, identifikasi risiko lingkungan, partisipasi masyarakat, dan penyusunan arah tindak lanjut kelembagaan. Kegiatan bertujuan meningkatkan pemahaman aparatur, mengidentifikasi kebutuhan administrasi lingkungan, serta merumuskan langkah awal tata kelola lingkungan berkelanjutan di Desa Oluhuta.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan dilaksanakan di Desa Oluhuta, Kecamatan Kabila Bone, Kabupaten Bone Bolango, pada 23 Mei 2026. Sasaran kegiatan meliputi kepala desa dan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa, lembaga kemasyarakatan, kelompok peduli lingkungan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta perwakilan warga. Tim pelaksana terdiri atas dosen dan mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Universitas Bina Taruna Gorontalo.

Pendekatan yang digunakan adalah Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini menempatkan aparatur dan masyarakat sebagai mitra yang terlibat dalam identifikasi masalah, pembahasan pilihan tindakan, dan penentuan kebutuhan tindak lanjut. Tahapan kegiatan meliputi: (1) observasi dan identifikasi awal kondisi desa; (2) sosialisasi mengenai kebijakan lingkungan berkelanjutan, mitigasi bencana, pengelolaan air, dan partisipasi masyarakat; (3) Focus Group Discussion untuk menginventarisasi masalah administrasi dan kelembagaan; (4) analisis kebutuhan terhadap regulasi, prosedur, koordinasi, dan pendampingan; serta (5) penyusunan rekomendasi tindak lanjut.

Data kegiatan diperoleh melalui catatan observasi, respons peserta dalam diskusi, dokumentasi kegiatan, dan hasil identifikasi kebutuhan. Analisis dilakukan secara deskriptif-kualitatif dengan mengelompokkan temuan ke dalam empat aspek, yaitu kapasitas sumber daya manusia, regulasi dan prosedur, koordinasi kelembagaan, serta partisipasi masyarakat. Kegiatan tidak menggunakan instrumen pra-test dan pascates; oleh sebab itu, hasil peningkatan kapasitas ditafsirkan sebagai indikasi kualitatif berdasarkan keterlibatan dan respons peserta, bukan sebagai perubahan terukur secara statistik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan berlangsung dalam bentuk penyampaian materi, diskusi, identifikasi masalah, dan pendampingan awal. Peserta menunjukkan keterlibatan aktif dalam membahas kondisi lingkungan desa, terutama risiko tanah longsor, kualitas air bersih, sampah, dan perlunya pengaturan yang lebih jelas pada tingkat desa. Dokumentasi pada Gambar 1 memperlihatkan proses sosialisasi dan dialog bersama aparatur serta masyarakat Desa Oluhuta.



Gambar 1. Pelaksanaan sosialisasi dan diskusi kebijakan lingkungan di Desa Oluhuta

Diskusi mengidentifikasi bahwa kapasitas administrasi lingkungan masih dipengaruhi oleh lima persoalan utama. Pertama, pengetahuan aparatur tentang regulasi lingkungan belum merata. Kedua, belum tersedia peraturan desa dan SOP yang secara khusus menjadi acuan pengelolaan lingkungan. Ketiga, keterbatasan anggaran menyebabkan program lingkungan cenderung bersifat insidental. Keempat, koordinasi antara pemerintah desa, BPD, lembaga kemasyarakatan, dan instansi teknis belum terstruktur. Kelima, partisipasi masyarakat masih memerlukan pengorganisasian yang lebih konsisten.

Tabel 1. Masalah, Intervensi, dan Arah Tindak Lanjut

No.	Masalah Utama	Intervensi Kegiatan	Arah Tindak Lanjut
1	Pemahaman regulasi belum merata	Sosialisasi dan diskusi regulasi lingkungan	Pelatihan berkala dan penyediaan ringkasan regulasi bagi aparatur
2	Belum ada Perdes/SOP lingkungan	Analisis kebutuhan dokumen kebijakan	Penyusunan Perdes dan SOP pengelolaan sampah, air, lahan, serta pengawasan kegiatan lokal
3	Koordinasi lembaga belum optimal	FGD pembagian peran pemangku kepentingan	Pembentukan forum atau tim kerja lingkungan desa

No.	Masalah Utama	Intervensi Kegiatan	Arah Tindak Lanjut
			dengan agenda dan pelaporan berkala
4	Partisipasi masyarakat belum konsisten	Pelibatan tokoh, pemuda, dan lembaga masyarakat	Penguatan kelompok peduli lingkungan dan kegiatan gotong royong berbasis jadwal
5	Data risiko dan program belum terkelola	Identifikasi awal risiko longsor dan air bersih	Pemetaan data rawan bencana, sumber air, sarana, dan kebutuhan program sebagai dasar perencanaan

Selain aspek pengetahuan, kegiatan menghasilkan arah pembenahan tata kelola. Peserta memahami bahwa kebijakan lingkungan perlu dituangkan ke dalam dokumen formal agar tidak bergantung pada respons darurat. Peraturan desa dapat memberi dasar pembagian kewenangan dan larangan, sedangkan SOP membantu aparaturnya menjalankan tahapan kerja yang seragam. Dalam konteks Desa Oluhuta, dokumen prioritas mencakup prosedur pengelolaan sampah, perlindungan sumber air, mitigasi longsor, pendataan lokasi rawan, dan koordinasi saat terjadi gangguan lingkungan.

Kegiatan juga memperkuat hubungan antara perguruan tinggi dan pemerintah desa. Keterlibatan mahasiswa memberi ruang pembelajaran kontekstual, sedangkan pemerintah desa memperoleh dukungan akademik dalam mengurai persoalan lokal. Foto bersama pada Gambar 2 memperlihatkan keterlibatan dosen, mahasiswa, dan masyarakat sebagai unsur penting dalam kemitraan partisipatif.



Gambar 2. Tim dosen, mahasiswa, aparaturnya, dan masyarakat Desa Oluhuta

Pembahasan

Temuan kegiatan menegaskan bahwa penguatan kapasitas administrasi perlu dipahami secara multidimensional. Kapasitas individu berupa pengetahuan aparatur penting, tetapi tidak cukup tanpa dukungan organisasi dan kelembagaan. Hal ini sejalan dengan Grindle (1997), yang menempatkan pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan sebagai unsur yang saling bergantung. Sosialisasi dalam kegiatan ini terutama memperkuat dimensi pengetahuan, sedangkan FGD dan analisis kebutuhan mulai menyentuh dimensi organisasi melalui identifikasi pembagian peran, kebutuhan dokumen, koordinasi, serta tindak lanjut. Oleh sebab itu, keberhasilan jangka panjang harus diukur bukan hanya dari pemahaman peserta, tetapi juga dari terbentuknya Peraturan Desa, SOP, basis data lingkungan, penanggung jawab program, alokasi anggaran, dan mekanisme evaluasi.

Pada aspek tata kelola lingkungan, kegiatan memperlihatkan bahwa masalah ekologis tidak dapat diselesaikan oleh pemerintah desa secara tunggal. Lemos dan Agrawal (2006) menjelaskan *environmental governance* sebagai konfigurasi kelembagaan dan proses pengambilan keputusan yang melibatkan pemerintah, komunitas, dan aktor sosial lainnya. Temuan di Desa Oluhuta mendukung pandangan tersebut karena penanganan longsor, air bersih, sampah, dan pelestarian sumber daya memerlukan koordinasi pemerintah desa, BPD, kelompok masyarakat, pemerintah kabupaten, perguruan tinggi, dan pelaku usaha. Kelemahan koordinasi yang ditemukan menunjukkan bahwa penguatan administrasi harus diarahkan pada mekanisme kolaborasi yang jelas, bukan sekadar pembagian tugas informal.

Pada aspek mitigasi, risiko longsor dan gangguan air bersih menunjukkan perlunya hubungan antara administrasi dan tindakan teknis. Pemerintah desa memerlukan data lokasi rawan, daftar kelompok rentan, peta sumber air, jalur evakuasi, prosedur peringatan, serta jadwal pemeliharaan sarana. Arah tersebut konsisten dengan Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 yang menekankan pemahaman risiko dan penguatan tata kelola risiko sebagai dasar pencegahan dan kesiapsiagaan (UNDRR, 2015). Dengan demikian, administrasi lingkungan bukan sekadar arsip, melainkan instrumen untuk mengubah informasi risiko menjadi keputusan, pembiayaan, koordinasi, dan tindakan pencegahan yang terukur.

Partisipasi masyarakat juga tidak boleh dimaknai sekadar kehadiran dalam kegiatan. Arnstein (1969) membedakan partisipasi simbolik dari partisipasi yang memberi warga pengaruh nyata dalam proses keputusan. Dalam kegiatan ini, keterlibatan peserta dalam mengidentifikasi masalah dan merumuskan tindak lanjut merupakan langkah awal menuju kemitraan, tetapi belum dapat disebut sebagai pemberdayaan penuh karena keputusan formal, sumber daya, dan mekanisme kontrol belum sepenuhnya dibagi dengan masyarakat. Implikasinya, Pemerintah Desa Oluhuta perlu melembagakan forum lingkungan, membuka akses informasi, melibatkan kelompok rentan, dan memastikan usulan warga masuk ke dokumen perencanaan serta penganggaran desa.

Klaim peningkatan kapasitas dalam kegiatan ini perlu dibaca secara hati-hati. Laporan menunjukkan respons positif, keterlibatan peserta, dan bertambahnya pemahaman secara kualitatif, tetapi belum menyediakan data dasar, skor pretes-pascates, atau evaluasi perilaku pascakegiatan. Karena itu, hasil yang paling dapat dipertanggungjawabkan adalah terbentuknya kesadaran awal, teridentifikasinya masalah administrasi, dan tersusunnya arah tindak lanjut. Kegiatan sosial berupa penyaluran bantuan sembako mempererat hubungan antara tim dan masyarakat, tetapi bukan indikator utama keberhasilan penguatan administrasi lingkungan. Evaluasi lanjutan perlu menggunakan indikator yang mencakup perubahan pengetahuan, produk kelembagaan, konsistensi pelaksanaan, partisipasi masyarakat, serta dampaknya terhadap pengelolaan risiko dan kualitas lingkungan.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian di Desa Oluhuta memberikan fondasi awal bagi penguatan kapasitas administrasi pemerintah desa dalam implementasi kebijakan lingkungan berkelanjutan. Sosialisasi, FGD, analisis kebutuhan, dan pendampingan membantu aparatur serta masyarakat memahami keterkaitan antara regulasi, mitigasi risiko, pengelolaan air, koordinasi kelembagaan, dan partisipasi warga. Hasil utama kegiatan berupa pemetaan persoalan administrasi lingkungan, peningkatan pemahaman secara kualitatif, penguatan kemitraan, serta arah tindak lanjut penyusunan Peraturan Desa, SOP, data risiko, dan forum kolaborasi.

Keberlanjutan hasil kegiatan memerlukan pendampingan berkala dan evaluasi berbasis indikator. Pemerintah Desa Oluhuta perlu memprioritaskan penyusunan Peraturan Desa tentang pengelolaan lingkungan, mengintegrasikan program ke dalam dokumen perencanaan dan anggaran desa, memperkuat kelompok peduli lingkungan, serta membangun sistem data sederhana. Perguruan tinggi dapat melanjutkan pendampingan melalui penyusunan dokumen, pelatihan teknis, dan pengukuran pretes-pascates agar perubahan kapasitas dapat dibuktikan secara lebih objektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, P. L. (1963). *Invitation to sociology: A humanistic perspective*. Doubleday.
- Cohen, B. J. (1992). *Sosiologi suatu pengantar*. Rineka Cipta.
- Horton, P. B., & Hunt, C. L. (1996). *Sosiologi* (Edisi ke-6). Erlangga.
- Koentjaraningrat. (2009). *Pengantar ilmu antropologi*. Rineka Cipta.
- Lawang, R. M. Z. (2004). *Kapita selekta sosiologi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/MENLHK-SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Program Kampung Iklim.
- Soekanto, S. (2017). *Sosiologi suatu pengantar* (Edisi revisi). Rajawali Pers.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216-224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>

- Grindle, M. S. (Ed.). (1997). Getting good government: Capacity building in the public sectors of developing countries. Harvard Institute for International Development.
- Lemos, M. C., & Agrawal, A. (2006). Environmental governance. *Annual Review of Environment and Resources*, 31, 297-325.
<https://doi.org/10.1146/annurev.energy.31.042605.135621>
- United Nations Office for Disaster Risk Reduction. (2015). Sendai framework for disaster risk reduction 2015-2030. United Nations.